

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Aceh Tenggara

Nuriza Acela¹, Erawadi², Zainal Efendi Hasibuan³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana UIN Syaikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan, nurizaacela0@gmail.com

Abstract

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam (STIT-BA) is a private university located in Kutacane, Southeast Aceh. In their efforts to increase the equality and quality of education, the government, society and the private sector should join hands. Different from the education system in developed countries, the education system in developing countries uses various favorable financing models for education development and prioritizes its regional budget for education development. This study uses a qualitative approach. This was done to reveal descriptive data about the actions, feelings, and experiences of the informants to the research focus. This study describes the education financing system at STIT-BA Aceh Tenggara. The results of the study show that STIT-BA uses a Centralized Financial System (SKT) for funds originating from Development Money and student tuition fees. Thus, the term "deficit" does not apply at STIT-BA. Funds allocated for certain activities, such as PPL costs, payroll and procurement of goods and other necessities. At STIT Babussalam Kutacane, the high school treasurer himself is responsible for comprehensive, proposal seminars, thesis guidance, munaqasyah, and graduation, and is responsible to the STITBA leadership. Thus, the fundraising model was implemented.

Keywords: STIT-BA Aceh Tenggara, Education Financing, Quality of Educationclear

Abstrak

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam (STIT-BA) merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Kutacane Aceh Tenggara. Dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan swasta hendaklah saling bergandengan tangan. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, sistem pendidikan di negara berkembang menggunakan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan untuk pembangunan pendidikan dan memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini dilakukan untuk mengungkapkan data deskriptif tentang tindakan, perasaan, dan pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Studi ini menggambarkan sistem pembiayaan pendidikan di STIT-BA Aceh Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STIT-BA menggunakan Sistem Keuangan Terpusat (SKT) untuk dana yang berasal dari Uang Pembangunan dan SPP mahasiswa. Dengan demikian, istilah "defisit" tidak berlaku di STIT-BA. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu, seperti biaya PPL, penggajian dan pengadaan barang dan keperluan lainnya. Di STIT Babussalam Kutacane, bendahara sekolah tinggi sendiri bertanggung jawab atas komprehensif, seminar proposal, bimbingan skripsi, munaqasyah, dan wisuda, dan bertanggung jawab kepada pimpinan STITBA. Dengan demikian, model penggalangan dana diterapkan.

Kata Kunci: STIT-BA Aceh Tenggara, Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan

Copyright (c) 2023 Nuriza Acela, Erawadi, Zainal Efendi Hasibuan

Corresponding author: Nuriza Acela

Email Address: nurizaacela0@gmail.com (Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa)

Received 17 June 2023, Accepted 25 June 2023, Published 5 July 2023

PENDAHULUAN

Konsep pendidikan masyarakat Indonesia saat ini menuntut untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan atau masyarakat pembelajar, yang berarti menguasai berbagai hal dan kemampuan yang dapat membuat masyarakat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungannya. Bersekolah adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan pendidikan lapisan masyarakat. Namun sayangnya, karena keterbatasan keuangan, beberapa

masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan tersebut karena terbentur dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. Ini merupakan masalah yang paling mendasar dalam proses pembangunan dunia pendidikan di Indonesia.

Secara substansial, kegiatan Pendidikan pada dasarnya tidak hanya terdiri dari sekolah formal saja, atau bahkan tidak cukup untuk mencapai pendidikan formal. Pendidikan formal lebih fokus pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar, dimana target yang dituju ada pada penguasaan terhadap keahlian tertentu untuk dapat melanjutkan pendidikannya secara mandiri pada tahap berikutnya karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. John Dewey dalam Alisufmengatakan bahwa pendidikan menyatu dengan hidup dan oleh karena itu terus berlanjut sepanjang hidup manusia dalam dunia ini.

Konsep pendidikan sepanjang hayat didirikan dengan tujuan agar setiap orang di Indonesia memiliki kemampuan untuk belajar, mendidik, dan mengembangkan diri secara terus menerus, selain sebagai kewajiban alami bagi manusia juga sebagai cara untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk proses pengembangan ini, pendidikan formal membutuhkan dana. karena anggaran diperlukan untuk setiap proses pengembangan agar semuanya berjalan sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Saat ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia bergantung pada pendidikan. Semua orang tahu bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara dipengaruhi sepenuhnya oleh kualitas pendidikan; jika kualitas pendidikan rendah, kualitas pendidikan juga ikut rendah. Oleh karena itu, pendidikan akan berjalan dengan baik selama pembiayaan memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam aturan perundangan-undangan dijelaskan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) dari Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengenai lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan Pasal 1 tentang standar pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 1 termasuk standar yang mengatur komponen dan jumlah "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku setiap tahun dalam Pasal 62 yang mencakup "biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal", menurut Bab IX: Standar Pembiayaan. Pasal 62 menyatakan bahwa: 1) Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) meliputi biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 4) Menurut ayat (1), biaya operasi satuan pendidikan terdiri dari: a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta semua tunjangan yang terkait dengan gaji mereka; b) Bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai; dan c) Sumber dana pendidikan di Indonesia. Menurut Abbas bahwa sistem pembiayaan pendidikan terdiri dari dua bagian yaitu: 1) lembaga pendidikan; dan 2) sumber dana luar sekolah. Maksud dari point nomor 1 (satu) adalah yang dikelola oleh pemerintah dan berasal dari APBN, APBD, dan SPP siswa serta bantuan lain dari lembaga atau donor yang tidak mengikat. Sedangkan pada point nomor 2 (dua) bermakna pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sumber dananya sebagian besar tertumpu pada masyarakat dan

sumber lain dari lembaga, donor, atau donator yang tidak mengikat, baik dalam negeri maupun internasional.

Senada dengan hal tersebut di atas, Fattah menyatakan bahwa orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, bisnis/unit usaha, dan pemberdayaan alumni dalam mengimpun dan memberikan jalan pendanaan kepada suatu lembaga pendidikan. Dalam sistem pembiayaan pendidikan, pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menciptakan dan mengelola sekolah. Semua negara memiliki sistem pembiayaan pendidikan yang berbeda, termasuk lokasi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik dan hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah dapat mempengaruhi alur dan sistem manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan. Analisis biaya pendidikan sebagai modal produktif; sebagai barang modal, tentu saja memiliki fungsi untuk produksi berikutnya. Biaya pendidikan harus dihitung untuk mengetahui apakah mencapai *rate of return*.

Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan keadaan suatu Negara atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan adalah dengan menghitung proporsi populasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat buta huruf. Selanjutnya, adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil dan efisien, karena pendidikan adalah satu-satunya sektor yang harus disubsidi lebih banyak daripada sektor lain. Bagaimana sumber daya dialokasikan dan diperoleh akan dipengaruhi oleh setiap keputusan yang dibuat tentang pembiayaan sekolah. Oleh karena itu, perlu ditentukan siapa yang akan dididik, seberapa banyak layanan pendidikan yang dapat disediakan, metode di mana mereka akan dididik, dan siapa yang akan membayar biaya pendidikan.

Selain itu, sistem pemerintahan harus memilih yang terbaik untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu siswa dan pendidikan kejuruan. Dengan mempertimbangkan keadaan sebelumnya, diperlukan penyelidikan tentang cara pembiayaan pendidikan sebenarnya dilakukan dan bagaimana pajak itu sendiri memengaruhi pendidikan.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Ini dilakukan untuk mengungkapkan data deskriptif tentang tindakan, perasaan, dan pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Studi ini menggambarkan sistem pembiayaan pendidikan STIT-BA Kutacane. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data kualitatif yang mencakup ungkapan, pandangan, pemikiran, dan tindakan setiap orang secara keseluruhan serta keadaan. Pokok penelitian dalam penelitian kualitatif adalah organisasi atau individu secara keseluruhan, dan tidak terbatas pada hipotesis atau variabel yang telah diatur sebelumnya. Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif tersebut, penelitian tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan akan meningkatkan kualitas

pendidikan sehingga lembaga pendidikan dapat bersaing dan unggul. Untuk mencapai tujuan ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan harus menjadi fokus penelitian ini, yang akan mempelajari secara menyeluruh setiap aspek terkait.

Lokasi penelitian sepenuhnya dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam (STIT-BA) Aceh Tenggara yang beralamat di Jalan Kutacane Medan, Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babussalam, Kutacane Aceh Tenggara. Sumber data primer diambil dari data keuangan dan sistem manajemen pembiayaan yang selama ini dilakukan oleh STIT-BA Aceh Tenggara melalui observasi, wawancara langsung kepada ketua STIT-BA, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta bendahara STIT-BA Aceh Tenggara. Adapun data sekunder diambil melalui berbagai literatur buku, jurnal dan majalah elektronik lainnya yang berurusan dengan topik pembahasan dalam kajian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 mengatur organisasi dan tata laksana sekolah tinggi. Senat Sekolah Tinggi mengatur organisasi dan tatakerja (ortaker) pada STIT-BA Aceh Tenggara dengan menetapkan Ketua yang dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua. Dalam pelaksanaannya, unsur pelaksana lainnya terdiri dari ketua jurusan yang dibantu oleh sekretaris jurusan dan staff, demikian juga pada lembaga penjaminan mutu yang terdiri dari ketua dan unsur jajaran yang dibutuhkan. dan pelaksanaannya. Menurut peraturan dan keputusan, STIT dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh Ketua I, II, dan III, serta seorang sekretaris ketua yang dipilih oleh ketua.

Dalam tatakelola keuangan, secara spesifik sepenuhnya dikelola oleh Wakil Ketua II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang berhubungan langsung dengan bendahara STIT-BA di bawah kordinir ketua STIT-BA. Selanjutnya ketua STIT-BA bertanggung jawab kepada ketua yayasan perguruan babussalam aceh tenggara.

Ada sejumlah peraturan yang dibuat oleh ketua yayasan dan ketua STIT-BA, termasuk statuta Sekolah Tinggi, peraturan pegawai, peraturan disiplin pegawai, peraturan etika pergaulan mahasiswa, peraturan tata tertib dosen dan mahasiswa, dan peraturan lainnya yang dianggap perlu.

Untuk menciptakan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, bertanggung jawab, dan adil, berbagai aturan tersebut membahas struktur organisasi, tugas, dan fungsinya. Aturan-aturan ini harus disosialisasikan dan dipatuhi oleh seluruh civitas akademika, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pelaksanaannya dievaluasi secara berkala melalui rapat-rapat Sekolah Tinggi dan rapat-rapat jurusan/prodi, serta melalui pemantauan atau supervisi di masing-masing unit.

STIT-BA Kutacane adalah perguruan tinggi swasta yang secara administratif berada di bawah naungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah-V (lima) Aceh. STIT-BA mengelola dua jurusan atau prodi jenjang S.1, yaitu S.1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan izin operasional yang tertuang dalam SK.No. DJ.I/380/2013 dan S.1 Pendidikan Guru

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) SK.No. DJ.I/2013/2016. Selain itu, dilengkapi dengan berbagai sarana dan unit pelaksana teknis, seperti Perpustakaan dan Unit Komputer, serta lembaga strategis dan unit kegiatan kelompok mahasiswa.

Sumber Pembiayaan Pendidikan STIT-BA Kutacane berasal dari sumber-sumber berikut:

1. Untuk dana yang berasal dari Uang Pembangunan dan SPP mahasiswa, STIT-BA menggunakan Sistem Keuangan Terpusat (SKT). Dengan demikian, istilah "defisit" tidak berlaku di STIT-BA. Dana untuk kegiatan tertentu seperti PPL, PKM, Komprehensif, Seminar Proposal, Bimbingan Skripsi, Munaqasyah, dan Wisuda dikelola oleh Bendahara sekolah tinggi sendiri, yang bertanggung jawab kepada ketua STIT-BA. Penerimaan tidak rutin lainnya seperti bantuan dari pemerintah daerah, dana aspirasi anggota dewan serta sumber dana lainnya juga dikelola langsung oleh bendahara dan dipertanggung jawabkan kepada ketua STIT-BA dan pembina yayasan perguruan babussalam.
2. Keseluruhan kebutuhan pendanaan dilevel jurusan dan unit, seperti pembiayaan sarana pembelajaran, pembelian peralatan laboratorium, dan alat tulis kantor diajukan secara tertulis kepada ketua STIT-BA melalui bendahara dan dieksekusi jika sudah mendapatkan persetujuan ketua melalui wakil ketua II. Pengelolaan dana untuk Prodi MPI dan PGMI dilakukan oleh STIT-BA. Untuk administrasi dan kebutuhan lainnya, prodi hanya mengajukan usulan anggaran melalui rapat kerja (Raker). Sekolah tinggi memberikan dana kepada prodi setelah usulan disetujui. Anggaran diawasi oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan (WK-II). Oleh karena itu, data pendapatan dan pengeluaran perusahaan tidak benar-benar dikelola oleh jurusan dan unit, tetapi hanya diberikan sebagai ringkasan. Namun, jumlah mahasiswasiswa yang terdaftar/ aktif dan jenis pengeluaran rutin untuk keperluan pendidikan dapat digunakan untuk menghasilkan data estimasi.
3. Honor dosen dan karyawan masih perlu dipertimbangkan—paling tidak sesuai dengan standar upah minimum propinsi—dan perolehan dana tahunan masih dianggap tidak memadai, terutama untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Salah satu kendala yang dihadapi STIT-BA adalah mahasiswanya yang berasal dari keluarga dengan pendapatan kategori kurang mampu.

Tidak tercapainya secara penuh dari tujuan yang telah ditetapkan sebagai akibat dari masih kurangnya pembiayaan untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Di antaranya, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen harus mencari dana dari sumber lain, sehingga mereka terkadang tidak hadir sepenuhnya atau terlambat dalam proses perkuliahan. Dampak lainnya adalah pada penelitian, karena anggaran kampus untuk penelitian masih sangat sedikit, sehingga dosen agak kewalahan untuk melakukan penelitian. Sementara anggaran penelitian pemerintah sudah ada, karena adanya persaingan dan Dosen masih belum memenuhi persyaratan sehingga sering kali hibah dana penelitian dari pemerintah pusat tidak dapat diikuti.

Pengeluaran yang ada di STIT-BA digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, kegiatan insidental, dan kegiatan ilmiah yang tidak biasa. Diskusi, rapat kerja, kuliah umum, dan lainnya untuk

pengembangan sarana dan prasarana, serta dana untuk membantu pihak lain yang membutuhkan juga bersumber dari pendanaan yang terbatas dari pihak pengelola perguruan tinggi.

Pengeluaran termasuk gaji dosen dan karyawan, honor bimbingan dan ujian skripsi, honor panitia, honor KKN dan PPL, dana penelitian, dan dana pengabdian masyarakat juga belum dapat dialokasikan dan direalisasikan dengan baik. Sementara itu, disisi lain, bendahara STIT-BA mengelola dana subsidi dari Yayasan untuk membiayai pengembangan program STIT-BA.

Sekolah Tinggi memberikan sedikit dana penelitian untuk mahasiswa dan dosen, walaupun demikian, minat dan ketertarikan dosen cukup tinggi untuk tetap melakukan penelitian sebagai unjuk kerja tridharma perguruan tinggi karena ada kebijakan prioritas pimpinan dalam mengusulkan peserta yang akan mengikuti sertifikasi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik yang dilakukan oleh para dosen. Bahkan ada dosen yang melakukan penelitian mereka sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau sekolah tinggi.

Salah satu hambatan dalam melakukan penelitian adalah kurangnya dana pemerintah untuk jatah perguruan tinggi swasta. Bahkan jika ada dana, penelitian harus dilakukan melalui hibah kompetitif dan bersaing dengan peserta seluruh dosen di Indonesia melalui lembaga penelitian Pendis Kemenag. Sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sekolah tinggi masih minim, baik dalam hal jenis pekerjaan maupun jumlah dana yang dialokasikan. Suasana keterbatasan ini, civitas STIT-BA tetap berupaya untuk melakukan promosi dan menarik minat masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi swasta ini melalui kegiatan bakti sosial (baksos) yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen serta safari Ramadhan yang diadakan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya. Selain itu, keterlibatan unsur pimpinan dan pengelola dalam organisasi kemasyarakatan dan berperan aktif dalam berbagai forum membuat nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam semakin dikenal di masyarakat. Tahun ajaran ini, STIT-BA memiliki mahasiswa aktif sebanyak 356 orang dan sudah dua kali melakukan wisuda dan penamatan yaitu tahun 2020 dan tahun 2022.

Sistem Pembiayaan Pendidikan di STIT-BA Aceh Tenggara

Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi STIT-BA Kutacane terdiri dari tiga tahapan penting dalam manajemen, yang jika diterapkan dalam pengelolaan keuangan akan menghasilkan sinkronisasi. *Tahap pertama* adalah perencanaan, yang berarti membuat anggaran. *Tahap Kedua* adalah penganggaran yaitu proses kegiatan atau proses menyusun anggaran. *Tahap Ketiga* adalah Budgeting. ini adalah rencana operasional yang ditulis dalam satuan uang dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Anggaran sistem program (*Program budget system*). Bentuk anggaran ini dimaksudkan untuk menentukan biaya yang terkait dengan setiap program. Jenis program menentukan anggaran program. Untuk membandingkan, anggaran butir per butir menyebutkan gaji dosen, tetapi anggaran program menyebut gaji perencanaan pengajaran sebagai salah satu komponen dan mencakup semua hubungannya dengan pelajaran.

Anggaran yang didasarkan pada kinerja (*Performance-based budget*). Jenis ini seperti namanya yaitu menekankan kinerja, atau prestasi, daripada rincian alokasi anggaran. Anggaran berdasarkan hasil ini adalah alat manajemen yang dapat mengidentifikasi satuan hasil program dan merinci setiap kegiatan yang perlu dibiayai.

Lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, muncul dari bawah dari ide tokoh agama setempat. Diawali dengan pengajian, diikuti dengan pembangunan mushalla atau masjid, madrasah diniyah, dan akhirnya, pesantren atau madrasah. Mereka tidak memiliki banyak pilihan, dan sebagian besar mulai dari kecil. Selanjutnya, ada yang tubuh dan tumbuh dengan cepat atau mengalami peningkatan kualitas yang berkelanjutan, ada juga yang stagnan (tidak bergerak), dan ada juga yang mati. Untuk terus berkembang hingga mampu mendirikan lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi, didukung oleh bisnis lain yang menguntungkan seperti pertanian, perdagangan, percetakan, industri jasa, dan lainnya.

Menurut John S Mrophet, ada lima model pembiayaan pendidikan yang berbeda. Salah satunya adalah *Model Grant Flat*, yang menggunakan sistem distribusi dana. Tidak ada perbedaan dalam kemampuan di antara distrik atau kabupaten/kota karena setiap murid menerima jumlah dana yang sama.

Persamaan Model berpusat pada kemampuan masyarakat untuk membayar. Sudah jelas bahwa masyarakat yang kurang mampu harus menerima bantuan dana yang lebih serius daripada masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan, *Complete State Model*, yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan pemerolehan pajak dan pembelanjaan lokal, tidak akan ada perbedaan dalam basis pajak properti sekolah lokal, dan itu tidak seimbang.

Agenda Pendirian bertujuan untuk menangani empat masalah utama yang berkaitan dengan pendidikan dan keuangan. Ini adalah pembelanjaan yang setara, penetapan dan penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan wewenang politik antara distrik sekolah lokal dan negara bagian, dan provinsi untuk mendorong peningkatan pendidikan yang berkelanjutan.

Pertama, negara harus menetapkan biaya per siswa per tahun untuk program pendidikan yang memadai. *Kedua*, negara harus menetapkan tarif pajak minimum yang harus diterapkan oleh semua distrik sekolah. *Ketiga*, negara harus memberikan hibah, atau hibah, kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Semua ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana fondasi. Namun, jumlah bantuan tidak bergantung pada upaya pajak, tetapi pada kekayaan lokal. Meskipun rencana fondasi membagi kue dengan porsi yang sama, distrik-distrik miskin mendapat prioritas lebih tinggi.

Berdasarkan analisis uraian di atas, tampaknya sulit untuk menggunakan konsep pembiayaan pendidikan STIT-BA Kutacane Aceh Tenggara sebagai salah satu model. Karena setiap komponen, seperti orang tua murid, pemerintah pusat, dan masyarakat, secara ideal harus membayar untuk pendidikan, beberapa model di atas dapat diubah menjadi model yang lebih cocok untuk setting area

pendidikan dan setting sosial budaya daerah. Sebaliknya, kampus juga menerapkan sistem penggalangan dana. Hal ini sejalan dengan gagasan Martin bahwa penggalangan dana adalah biaya utama yang berasal dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Oleh karena itu, pihak Yayasan menjalankan manajemen yang dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang dimiliki, didirikan, dan digunakan oleh masyarakat. Manajemen pendidikan Islam yang tepat dapat mendekatkan pendidikan Islam ke masyarakat, membuatnya diterima, dimiliki, dan dibanggakan oleh masyarakat, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Semangat untuk membangun institusi pendidikan melalui amal bukan sesuatu yang baru; umat Islam bahkan pernah menjadi pelopor (*avant-garde*) dalam komitmennya untuk membangun institusi pendidikan melalui semangat amal. Sekarang masalahnya adalah bagaimana menghidupkan kembali semangat beramal ini saat mengembangkan pendidikan Islam.

Pertama, ada lembaga seperti Board of Trustees yang terdiri dari anggota masyarakat yang berintegritas dan berdedikasi terhadap pendidikan Islam. *Kedua*, semangat jihad dan etos kerja semua stake holder internal harus dibangkitkan kembali sebagai amal nyata. *Ketiga*, manajemen mutu terpadu harus diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Anggaran, akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, dan pendistribusian, investasi, dan pemeriksaan adalah komponen utama manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini menganut prinsip bahwa fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan berbeda. Di atas sudah dijelaskan bahwa otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran anggaran donatur; otorisator juga memiliki wewenang untuk melakukan pengujian dan menetapkan pembayaran untuk segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Dalam hal bendaharawan, mereka adalah orang yang memiliki otoritas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, serta melakukan perhitungan dan bertanggung jawab.

Finansial institusi pendidikan tinggi STIT-BA Kutacane mengacu pada proses penggunaan pendapatan dan sumber daya lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, serta proses pengalokasian sumber daya tersebut. Secara umum, pengelolaan keuangan mencakup segala tindakan perusahaan yang berkaitan dengan memperoleh dana, mengalokasikan dana, dan mengelola aset secara menyeluruh untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, manajemen keuangan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar institusi pendidikan dapat beroperasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa gagasan tentang sistem keuangan pendidikan tinggi Islam. Salah satunya adalah bahwa organisasi usaha dan keuangan Islam, seperti wakaf, zakat, dan baitul mal, harus mengembangkan gagasan tentang cara mendukung pendidikan, seperti beasiswa, pembangunan gedung, dan hal lain, sehingga pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik. Karena masalah pendidikan Islam saat ini adalah pendidikan yang kurangnya dana.

KESIMPULAN

Sekolah Tinggi Islam harus membentuk sebuah lembaga untuk saling membantu dan mengawasi sekolah lain yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, dana akan dialokasikan dengan tepat dan pendidikan islam tidak akan diabaikan.

Untuk mencapai rate of return, pemerintah daerah harus meningkatkan sumber daya manusia. yang berpendidikan dan mampu menguasai berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan Islam. Tidak mungkin bagi pemerintah Indonesia untuk melepaskan diri dari partisipasi swasta dan masyarakat dalam sistem pembiayaan pendidikan.

Dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan swasta saling bergantung. Di sinilah pajak digunakan untuk membiayai semua kebutuhan negara, termasuk pembangunan, termasuk pendidikan, yang akan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi semua orang. Biaya pendidikan tinggi sebagian besar berasal dari pajak yang dimasukkan ke dalam APBN dan APBD. Beberapa bentuk pajak yang dimaksudkan untuk membiayai pendidikan termasuk pajak kekayaan, pajak penghasilan individu, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Idealnya, masyarakat, pemerintah daerah, dan orang tua murid harus membayar pendidikan. Ada kemungkinan bahwa sejumlah model pembiayaan pendidikan dapat diubah menjadi model yang ideal untuk disesuaikan dengan lingkungan pendidikan dan sosial budaya lokal. Sebaliknya, STIT-BA Kutacane juga menerapkan sistem penggalangan dana. Tidak mungkin bagi pemerintah Indonesia untuk melepaskan diri dari partisipasi swasta dan masyarakat dalam sistem pembiayaan pendidikan. Dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan swasta saling bergantung. Di sinilah pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, termasuk pembangunan, termasuk pendidikan, yang membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Alexander, Kern, Morphet Edgar L, and Johns Roe L. *The Economics and Financing of Education*, 2013.
- Arismunandar. "Manajemen Berbasis Sekolah." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2016): 108. [http://eprints.unm.ac.id/15834/13/BUKU MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH %281%29.pdf](http://eprints.unm.ac.id/15834/13/BUKU_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH%281%29.pdf).
- Fattah, N. *Standar Pembiayaan Pendidikan*., 2016.
- Fironika, Rida. "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2005): 43–64.
- Martin, Dr., Santinah, Sunardi Sunardi, Sunaryo Sunaryo, Rai Budi, Buhari Luneto, Sunhaji Sunhaji, et al. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep Dan Aplikasinya." *Ansiru* 1, no. 2 (2016):

232. <http://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/3990>.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. *Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Kemenristekdikti*, 2018.

Nanang, Fattah. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya*. Vol. 78, 2000.

Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.

H. M. Rifa'i Matondang, Ketua Yayasan Perguruan Babussalam Aceh Tenggara

Harli, M.Ag, Ketua STIT-BA Aceh Tenggara

Dr. Syadidur Kahar, M.Pd, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan STIT-BA Aceh Tenggara

H. Saleh Adri, M.Ag, Wakil Ketua II Bidang Keuangan STIT-BA Aceh Tenggara

Syaji Harun, S.E, Bendahara STIT-BA Aceh Tenggara